

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN  
UNITED STATES DEFENSE INSTITUTIONAL REFORM INITIATIVES**

**INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY ON THE COOPERATION  
BETWEEN INDONESIAN MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND UNITED STATES DEFENSE INSTITUTIONAL  
REFORM INITIATIVES**

Synthia Fawaati<sup>1</sup>

Setyo Harnowo<sup>2</sup>, Muradi<sup>3</sup>

(faawsynth@gmail.com)

**Abstrak:** Jurnal ini membahas kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dan *United States Defense Institutional Reform Initiatives* (U.S. DIRI), fokus pada penyelenggaraan *international best practise sharing* dalam bidang manajemen sumber daya pertahanan. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri 'Model Pilihan Rasional' untuk menganalisa pertimbangan Indonesia dalam kerjasama, begitu juga konsep Diplomasi Pertahanan untuk menganalisis kontribusi kerjasama bagi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Lebih jauh, penelitian ini dapat mengklarifikasi polemik yang muncul dikalangan masyarakat dan elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menyadari adanya dua kepentingan utama dalam memutuskan kerjasama dengan U.S. DIRI, yaitu *capacity building* dan *trust building* sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. *Capacity building* dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi Kemhan RI dan TNI. *Trust building* ditujukan bagi peningkatan kepercayaan kedua negara. Peningkatan kepercayaan yang ditunjukkan melalui aktivitas dalam kategori CBMs memiliki implikasi pada keinginan kedua negara untuk melakukan kerjasama yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Kerjasama, *International Best Practise Sharing*, Diplomasi Pertahanan

**Abstract:** This research journal discusses the cooperation between Indonesian Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) and *United States Defense Institutional Reform Initiatives* (U.S. DIRI), focused on *international best practise sharing* in defense resource management. Previous studies of cooperation between Indonesia and U.S. did not yet employ the

---

<sup>1</sup> Alumnus Pascasarjana Program Studi Diplomasi Pertahanan Cohort 2, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

<sup>2</sup> Laksda TNI (Purn) Prof. Dr. drg. Setyo Harnowo, Sp. BM (K) FICD, FICCDE merupakan Dosen Tetap Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing Pertama dalam penelitian

<sup>3</sup> Muradi, Ph. D merupakan Dosen Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing Kedua dalam penelitian

theory of Foreign Policy Analysis 'Rational Choice Model' to analyze the Indonesian consideration in the cooperation, also this research utilizes Defense Diplomacy as conceptual framework to analyze the contribution of cooperation for Indonesia and U.S relation. Furthermore, It clarifies the evoked polemic among Indonesian public and elites as well. The result shows that Indonesia considered two main interests for making decision with U.S. DIRI, namely capacity building and trust building based on Indonesian Defense White Paper 2015. The capacity building aimed at improving human resources of Ministry of Defense and Indonesian Army. Trust building interest that was harmoniously gained within the cooperation has been contributing to Indonesia and U.S. confidence building measures. Confidence building between two countries has increased, demonstrated by activities in the category of CBMs. This implies the desire of both countries to carry out wider cooperation.

**Keywords:** Cooperation, International Best Practise Sharing, Defense Diplomacy

## Pendahuluan

**D**inamika hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat telah ditunjukkan sejak hubungan diplomatik secara resmi terjalin pada tahun 1949, hingga keduanya mengalami penurunan kerjasama ketika terjadi embargo militer. Pada tahun 2005, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan yang berimplikasi pada peningkatan berbagai kerjasama, diantaranya pendidikan militer, kontra-terorisme, kebencanaan, dan sebagainya.<sup>4</sup> Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin menunjukkan peningkatan dengan disepakatinya *Comprehensive Partnership* pada tahun 2010, sebagai kerjasama yang lebih erat dibandingkan kerjasama bilateral pada

umumnya. Kerjasama ini mengacu pada pada tiga pilar<sup>5</sup>, diantaranya a) politik dan keamanan; b) ekonomi dan pembangunan; c) sosial, teknologi dan lingkungan. Pada proses pengimplementasian pilar politik dan keamanan, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki *Defense Framework Arrangement on Security*<sup>6</sup> yang fokus penanganan bidang pertahanan-keamanan serta mengintegrasikan berbagai kerjasama yang telah terbentuk selama ini<sup>7</sup>.

Kehadiran *comprehensive partnership* menjadi momentum penguat *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD), yang mendukung reformasi sektor pertahanan. Atas dasar

---

<sup>4</sup> A. M. Denmark, R. Sukma, & C. Parthemore, *Crafting a Strategic Vision: A New Era of U.S.-Indonesia Relations*, (2010), Washington, DC: Center for New American Security (CNAS), hlm. 15

---

<sup>5</sup> DoS. (2011, 7 24), *United States- Indonesia Comprehensive Partnership*, Dipetik 5 5, 2016, dari U.S. Department of State: [www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/169001.htm](http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/169001.htm)

<sup>6</sup> *Loccit*

<sup>7</sup> Kemlu, (2011), *Diplomasi Indonesia 2010*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

*Comprehensive Partnership* pada *Joint Commission Meeting-3* dan *IUSSD ke-10* Tahun 2012, maka kerjasama untuk mengelola sektor pertahanan diwujudkan melalui kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI.<sup>8</sup> Perkembangan kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI dinilai bermanfaat bagi institusi pertahanan Indonesia karena memberikan saran dalam level strategis hingga teknis.<sup>9</sup> Menurut Ediwan Prabowo, U.S. DIRI telah mendukung dan membantu dalam pengembangan *Renstra Pertahanan Indonesia II (2015-2019)*, ditandai dengan kedatangan staf U.S. DIRI delapan kali ke Jakarta dalam rangka bekerja sama dengan staf Kemhan RI dan Mabes TNI/ Angkatan, dengan pemberian masukan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas personel.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan program U.S. DIRI dari aspek SDM untuk meningkatkan sistem pertahanan secara

---

<sup>8</sup> Strahan, (2016), *Unpublished Document: Kerjasama Pembentukan Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI*, Jakarta: Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

<sup>9</sup> Afrida, N, (2015, 1 8), *US to get involved in RI military*, Dipetik 6 15, 2016, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/08/us-get-involved-ri-military.html>

<sup>10</sup> DMC, (2015, 1 7), *Action Plan 2015: Pedoman Kerjasama Peningkatan Sistem dan Manajemen Pertahanan*, Dipetik 5 5, 2016, dari Defence Media Center Kementerian Pertahanan: <http://dmc.kemhan.go.id/post-action-plan-2015-pedoman-kerjasama-peningkatan-sistem-dan-manajemen-pertahanan.html>

profesional bagi TNI melalui *international best practise sharing*.<sup>11</sup>

Namun demikian, kemanfaatan kerjasama yang telah dinilai pihak Kemhan RI ini justru mendapatkan respon beragam, baik menolak kehadiran U.S. DIRI maupun keinginan untuk meninjau ulang kerjasama yang telah berlangsung. Respon ini menjadi polemik karena terdapat kekhawatiran adanya pelibatan pihak U.S. DIRI secara langsung didalam proses penyusunan *Renstra Pertahanan Indonesia (2015-2019)*. Terutama mengingat dalam perumusan *Renstra Pertahanan Indonesia* terdapat pembahasan internal negara berkaitan dengan SDM, alutsista, anggaran, sarana dan prasarana, yang menjadi informasi kekuatan pertahanan Indonesia. Klarifikasi Kemhan RI juga direkomendasikan oleh Mufti Makarim mengingat dinamika yang terjadi pada kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI *Renstra* membutuhkan penjelasan dari pihak Kemhan RI.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu kajian kebijakan luar negeri yang dapat

---

<sup>11</sup> Sullivan, A, (2014), *Strengthening U.S.-Indonesia Defense Ties*. Washington, DC: Center for New American Security, hlm. 8

<sup>12</sup> Putra, D, (2015, 1 9), *Pihak Asing Dilarang Ikut Susun Renstra Pertahanan*, Dipetik Agustus 10, 2016, dari Sinar Harapan: <http://sinarharapan.co/news/read/150109052/pihak-asing-dilarang-ikut-susun-renstra-pertahanan>

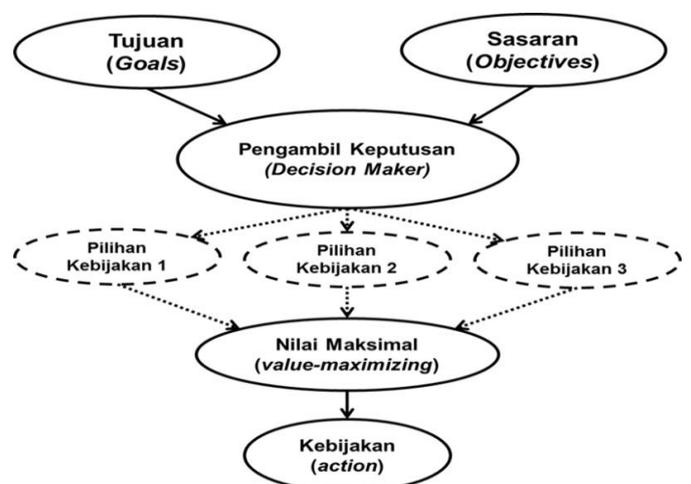
menjelaskan pertimbangan Indonesia dalam kerjasama, beserta kontribusi yang diberikan dari kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI bagi hubungan pertahanan kedua negara ditinjau dari diplomasi pertahanan.

### **Teori Kebijakan Luar Negeri: Model**

#### **Pilihan Rasional**

Analisis terhadap proses pertimbangan yang dilakukan *decision maker* dapat dijumpai melalui Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Process*). Teori Pengambilan Keputusan atau seringkali disebut sebagai Teori Kebijakan Luar Negeri, diperkenalkan Graham T. Allison ketika ia menganalisis Studi Kasus Misil Kuba. Ia menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dianalisis melalui tiga model di antara lain Model Pilihan Rasional, Model Proses Organisasional, dan Model Politik Birokratik.<sup>13</sup> Berdasarkan Model Pilihan Rasional, unit dasar analisis berupa negara (*national actor*). Negara dianggap sebagai aktor yang dapat menentukan tindakan secara rasional karena sebuah pertimbangan dipengaruhi oleh komponen tujuan dan sasaran, opsi, konsekuensi, dan pilihan.<sup>14</sup>

Ketika tujuan dan sasaran dapat diidentifikasi, maka muncul berbagai opsi tindakan yang dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Opsi-opsi yang dimiliki negara kembali dipertimbangkan konsekuensinya oleh *decision maker* sehingga muncul satu pilihan. Pilihan (kebijakan) ini yang selanjutnya dinilai kemanfaatannya bagi pencapaian sasaran dan tujuan negara. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti memvisualisasikan proses dalam Teori Kebijakan Luar Negeri pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Model Pilihan Rasional Sumber: Graham T. Allison, 1969 (Telah Diolah Kembali)

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kepentingan nasional suatu negara. Daniel S. Papp menjabarkan bahwa kepentingan nasional terdiri dari aspek ekonomi, ideologi, kekuatan dan

<sup>13</sup> Allison, G. T. (1969, 9), *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*, *The American Political Science Review*, 63(3), 689-718, hlm. 690

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 694

keamanan militer, legalitas, dan moralitas.<sup>15</sup> Dalam Donald E. Nuechterlein (1997), kepentingan keamanan masuk dalam kategori *Vital Defence Interest*, yakni kepentingan yang diwujudkan secara mutlak karena integritas wilayah bersifat vital.<sup>16</sup> Kepentingan pertahanan dan keamanan suatu negara merupakan kepentingan yang paling utama, diwujudkan melalui cara berikut<sup>17</sup> a) memperkuat kerjasama dan hubungan baik dengan negara sahabat; b) memelihara hubungan erat dengan negara-negara sehaluan; c) normalisasi dengan negara-negara yang memusuhi. Lebih jauh, kepentingan politik tersebut dapat dicapai melalui beberapa tindakan politik seperti a) membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*); b) menunjukkan itikad baik; dan c) menghilangkan keraguan negara lain dengan transparansi politik keamanan dalam negeri.<sup>18</sup>

Pencapaian kepentingan nasional itu sendiri tidak dapat diwujudkan tanpa

adanya dukungan sumber daya nasional. Maka, sumber daya nasional penting untuk diperhatikan sebagai gambaran kekuatan negara yang dialokasikan untuk mewujudkan kepentingan nasional.<sup>19</sup> Dukungan sumber daya alam pada kepentingan nasional dikemukakan oleh Joseph Frankel, kelompok *objectivist* melihat bahwa negara memiliki salah satu pertimbangan berkaitan sumber daya, sementara *subjectivist* melihat kepentingan dari segi politis seperti peningkatan citra negara.<sup>20</sup> Dalam konteks pertahanan, sumber daya nasional dapat dikonversikan ke sektor pertahanan melalui pengembangan sumber daya strategis seperti infrastruktur militer, anggaran pertahanan, postur pertahanan, logistik pertahanan.<sup>21</sup> Bakrie (2014) memperjelas bahwa sumber daya pertahanan tidak terbatas pada anggaran, melainkan juga mencakup SDM, teknologi, karakteristik fisik negara, dan kualitas kepemimpinan nasional.

---

<sup>15</sup> Papp, D. S, (1988), *Contemporary International Relations: A Framework for Understanding*, 2nd Edition. New York: MacMillan Publishing Company

<sup>16</sup> Nuechterlein, D. E, (1997), *United States National Interest in a Changing World*, Lexington KY: The University Press of Kentucky, hlm. 168-169

<sup>17</sup> Roy, S, (1995), *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>18</sup> Luccit

---

<sup>19</sup> Jemadu, A, (2008), *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*, Jogjakarta: Graha Ilmu

<sup>20</sup> Burchill, S, (2005), *The National Interest in International Relations Theory*, New York: Palgrave Macmillan

<sup>21</sup> Bakrie, C. R, (2014), *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

## Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan.<sup>22</sup> Terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasi makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures (CBMs)*, *civil-military relation* dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense*.<sup>23</sup> Pedrason menjelaskan bahwa dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing.

Pencapaian kesepahaman (kepercayaan) dapat dilihat dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs terutama dalam rangka menciptakan perdamaian, meskipun seringkali konsep CBMs lebih banyak dibahas pada masa konflik. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs di bidang militer telah dikemukakan Baviera di dalam Tabel 1. Dengan mengidentifikasi aktivitas komunikasi, transparansi, konsultasi, itikad baik, dan batasan diantara pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>22</sup> Pedrason, R, (2015), *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?*, Heidelberg: Universitat Heidelberg, hlm. 15

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 16

**Tabel 1.** Tipologi CBMs<sup>24</sup>

<b>Military CBMs</b>	<b>Unilateral</b>	<b>Bilateral</b>	<b>Multilateral</b>
Communications		Hotlines; Regular Bilateral Dialogue	Track Two Dialogues
Transparency	Defense White Paper; Arms Registry; Notification Measures	Observance at military exercises; intelligence exchange	Common Outline for Defense Publications
Consultation		Joint Commission	ARF; ASEAN Senior Officials Meeting
Goodwill	Policy of Non- Interference in Internal Affairs	Visit; Cross-Training; Code of Conduct	
Constraints	Rule of Engagement; No First Strike Declaration; Troop Reduction	Non-Agression Agreement; Troop Reduction Agreement	Code of Conduct; Disarmament and Demilitarization Agreements

Sumber: Alieen S.P. Baviera, dalam Dong Wang & Xin Jiang, 2009

<sup>24</sup> Baviera, A. S, (2001), *Bilateral Confidence Building with China in Relation to the South China Seas Dispute: A Phillipine Perspective*, Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada

## **Pertimbangan Indonesia dalam Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI**

Pertimbangan Indonesia melalui Kemhan RI dalam melaksanakan kebijakan, dianalisis lebih lanjut dengan memahami proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan Model Pilihan Rasional, pertimbangan Indonesia dipengaruhi oleh tujuan dan sasaran yang dapat diidentifikasi dari kepentingan nasional.

### **a. Capacity Building**

Kebijakan Kemhan RI bekerja sama dengan U.S. DIRI dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia dalam mengupayakan pembangunan kapasitas pertahanan (*defense capacity building*). Hal ini sejalan mengingat *capacity building* merupakan salah satu bidang yang dikembangkan oleh kebijakan pembangunan pertahanan Indonesia melalui pembangunan kerjasama internasional.<sup>25</sup> Dalam *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America* yang terterta pada

---

<sup>25</sup> Kemhan, (2015), *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hlm. 41

dokumen *Kemhan-DIRI Action Plan* (KDAP), kedua pihak setuju agar bidang kerjasama yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan SDM pada institusi pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan (Kemhan, 2015, hal. 83).<sup>26</sup>

*Capacity building* diwujudkan dalam bentuk pelatihan berupa seminar, *workshop*, dan *training* yang diberikan U.S. DIRI kepada Kemhan RI dan TNI. Bentuk kegiatan ini sesuai dengan konsep hubungan internasional bidang pertahanan berkaitan dengan poin ‘seminar, *workshop*, dan berbagai pertukaran tenaga ahli’.<sup>27</sup> Saat pelaksanaan, topik *Defense Resource Management* sesuai dengan maksud *capacity building* bidang SDM yang diidentifikasi dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia. Melalui kegiatan ini, Indonesia dapat belajar mengenai *reform* dan *institusi* yang selama ini telah diterapkan Amerika Serikat melalui kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI.<sup>28</sup> Pelibatan Kemhan RI yang dimaksud

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>27</sup> Supriyatno, M, (2014), *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia, hlm. 183

<sup>28</sup> Wawancara dengan Menteri Pertahanan Periode 2009-2014, Prof. Purnomo Yusgiantoro, 26 Oktober 2016

terdiri dari Ditjen Renhan, Ditjen Strahan, dan Ditjen Pothan, sementara Mabes TNI dan Angkatan selalu bergabung dalam setiap kerjasama yang berlangsung pada setiap Ditjen. Disamping itu, institusi lain yang memiliki kontribusi dalam *capacity building* pertahanan juga bergabung dalam beberapa kesempatan. Maka, jelas bahwa Kemhan RI memiliki kepentingan dalam *capacity building* profesionalisme SDM bagi kelembagaan.

Pada tahun 2013, Ditjen Renhan ditetapkan sebagai *focal point* selama kegiatan berlangsung. Dalam kegiatan, topik yang ditetapkan berkaitan dengan *The Resource Management for Defense Strategic Planning* diikuti oleh perwakilan dari Kemhan RI, Mabes TNI/Angkatan serta institusi pendukung lain. Sejalan dengan pertimbangan pemilihan topik di atas, Dirjen Renhan menyatakan bahwa pihak Indonesia memperoleh pengetahuan *Resource Management* yang dinilai penting bagi para personil yang akan bertanggung jawab dibidang perencanaan pertahanan Indonesia terutama ketika tahun ini merupakan tahun dimana Kemhan RI mulai melakukan persiapan bagi produk Renstra Pertahanan 2015-

2019.<sup>29</sup> Pengetahuan ini yang diharapkan dapat mengembangkan proses penyusunan Renstra Pertahanan 2015-2019. Maka dari itu, U.S. DIRI menyediakan bantuan keahlian untuk mendukung pengembangan Renstra melalui praktik terbaik internasional (*international best practise sharing*). Menurut U.S. DIRI, kerangka kerja yang dapat mendukung pengembangan Renstra Pertahanan suatu negara, didukung oleh tahapan LCC, *Defense Planning Roadmaps*, dan *Capability Assessment*. Pelaksanaan ketiga tahapan tersebut harus didukung oleh keahlian dalam menggunakan alat bantu pengelolaan sumber daya pertahanan, seperti LCC, *Analysis of Alternatives (AoA)*, *Defense Acquisition Roadmaps for Long Term Planning*, dan *Capability Assessment*, FOCIS, dan sebagainya.

Pada tahun 2014, kerjasama masih dilakukan antara Ditjen Renhan dan U.S. DIRI terkait *International Best Practise In Defense Resource Management*.<sup>30</sup> Bahkan,

---

<sup>29</sup> Renhan, (2013), *Unpublished Document: Laporan Terbatas Sambutan Dirjen Renhan Kemhan Pada Seminar The Resource Management for Defense Strategic Plan*, Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hlm. 4

<sup>30</sup> Renhan, (2014), *Unpublished Document: Buku Laporan Perencanaan Pembangunan Pertahanan*

penyelenggaraan kegiatan mendedikasikan dua *workshop* khusus membahas pengembangan Renstra 2015-2019.<sup>31</sup> Disamping materi yang semakin beragam, terdapat program tambahan berupa *training* yang diberikan kepada pihak Indonesia agar dapat memiliki keahlian dalam menggunakan alat bantu FOCIS. Pada tahun 2015, FOCIS mulai diaplikasikan kepada masing-masing peserta ditandai dengan instalasi perangkat lunak FOCIS pada laptop peserta. Berkaitan dengan proses *entry data* yang harus dilakukan, demonstrasi FOCIS hanya menggunakan database negara “Zed” yang sudah diisi.<sup>32</sup> Artinya, data yang digunakan dalam mengisi tabel-tabel kebutuhan hanya sekedar data asumsi (*dummy*) karena sudah ditegaskan bahwa segala bentuk data rahasia negara tidak dapat dibagikan meskipun dalam pelatihan.

Berdasarkan dokumen laporan Ditjen Renhan, FOCIS dapat diaplikasikan untuk menghitung atau menyesuaikan anggaran yang diterima dengan cara disesuaikan dengan

kemampuan satuan (*capability*) yang diinginkan meskipun Indonesia mengalami keterbatasan anggaran. Namun, berbeda dengan hasil wawancara dari pihak Kemhan RI yang menyatakan bahwa aplikasi FOCIS tidak dapat diaplikasikan di Indonesia mengingat penggunaan FOCIS ini berbasis pada program (*based on program*). Satu sisi, wajar jika FOCIS dioperasikan dengan berbasis program karena materi FOCIS diberikan sesuai dengan pengalaman Amerika Serikat yang mumpuni secara kapasitas anggaran pertahanan, maka tidak masalah bagi Amerika Serikat untuk melakukan kalkulasi berdasarkan program terlebih dahulu dan dapat mengeksekusi seluruh program secara bersamaan. Sisi lain, berbeda dengan kondisi di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan anggaran sehingga kalkulasi perencanaan didasarkan pada anggaran (*based on budget*). Perbedaan pendapat mengenai fungsi FOCIS yang berasal dari pihak Kemhan RI sendiri, mengidentifikasi beberapa asumsi diantaranya a) Kemhan RI dan TNI telah memiliki pola penghitungan tersendiri, dan/atau b) Kemhan RI tidak ingin menggunakan

---

*Ideal*, Jakarta: Ditjen Renhan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

<sup>31</sup> Renhan, (2015), *Unpublished Document: Laporan Terbatas Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan*, Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

<sup>32</sup> Renhan, (2014), *Opcit.*, hlm. 2

aplikasi karena alasan tertentu yang tidak dikemukakan.

Apabila ditinjau lebih dalam mengenai asumsi poin a dan b, alasan FOCIS tidak dapat diaplikasikan di Indonesia sebagai berikut. Pertama, Indonesia telah memiliki regulasi sendiri dalam menghitung anggaran, seperti RKA-KL dari Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Setelah Renja Kemhan RI ditetapkan, maka Kemhan RI menyesuaikan Renja menjadi RKA-KL. Aplikasi RKAKL-DIPA sendiri telah disosialisasikan melalui website Direktorat Jenderal Anggaran Kemkeu RI, beserta pembaruan yang dilakukan pada aplikasi setiap tahun. Penerbitan RKAKL ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan dengan tetap berlandaskan konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka penganggaran jangka menengah.<sup>33</sup>

Kedua, FOCIS tidak dapat diaplikasikan di Kemhan RI dan TNI

karena kewenangan dalam penyusunan rencana dan kebutuhan anggaran (renbutgar) tidak dilakukan langsung oleh Kemhan RI karena perlu masukan dari unit terkecil. Sesuai dengan Permenhan No. 28 Tahun 2015, Pasal 26: 4, bahwa masukan terhadap renbutgar dilakukan dari unit yang terbawah dimulai dari Satuan Kerja memberikan masukan kepada unit organisasi Mabes TNI dan Angkatan. Lalu, (26: 2) Mabes TNI dan Angkatan menyerahkan masukan renbutgar kepada Kemhan RI. Selanjutnya, (26: 1) pihak Kemhan RI menyerahkan renbutgar kepada Bappenas dan Kemkeu. Proses di atas mengidentifikasi bahwa penyusunan renbutgar dimulai dari unit organisasi yang ruang lingkup paling kecil.

Sementara Kemhan RI hanya memfasilitasi proses administrasi ke Bappenas dan Kemkeu, maka kondisi yang terjadi a) proses *entry data* pada aplikasi penyusunan perencanaan didasarkan pada anggaran (*based on budget*) yang langsung di bawah wewenang unit organisasi; b) Kemhan RI tidak dapat menentukan program-program secara terpusat layaknya yang dioperasikan di dalam FOCIS, kecuali jika posisi TNI di Indonesia sudah jelas seperti posisi angkatan militer Amerika

---

<sup>33</sup> Kemkeu, (2011), *Aplikasi RKA-KL*, Dipetik Februari 11, 2017 dari Departemen Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-produk-aplikasi-list.asp?sub=1>

Serikat dimana militer berada di bawah posisi DoD secara hirarki untuk masalah anggaran.<sup>34</sup>

Dengan demikian, FOCIS dianggap tidak relevan untuk diaplikasikan di Indonesia karena Kemhan RI telah memiliki acuan sejenis yang bernama RKA-KL. Disamping itu, FOCIS tidak dapat diaplikasikan karena didasarkan pada program, sedangkan proses perencanaan Kemhan RI didasarkan anggaran. Penerimaan terhadap materi FOCIS merupakan hal yang wajar karena FOCIS diharapkan dapat membantu Kemhan RI dalam mempermudah kalkulasi kebutuhan sesuai dengan anggaran. Hal ini mengingat kondisi anggaran pertahanan di Indonesia yang masih terkendala. Bahkan, diakui oleh Begi Hersutanto bahwa bagaimanapun tidak ada perencanaan pertahanan (anggaran) yang sempurna.<sup>35</sup> Perencanaan yang belum sempurna ini ingin ditingkatkan melalui ilmu baru dan masukan yang dapat diterapkan di Indonesia terutama dapat diaplikasikan pada Mabes TNI dan pengguna. Indonesia ingin memaksimalkan

anggaran yang terbatas sehingga Kemhan RI, Mabes TNI, Mabes Angkatan perlu mempelajari perencanaan terhadap sumber daya pertahanan yang lebih baik.

Para informan mengakui bahwa FOCIS memiliki konsep yang bagus sehingga dapat menjadi referensi penting ketika Indonesia telah memiliki kekuatan ideal. Referensi penting yang dimaksud adalah ilmu untuk mengkalkulasikan kebutuhan anggaran versi praktik terbaik internasional<sup>36</sup> diantaranya a) personil, b) pembelian peralatan baru dan pemeliharaan peralatan lama, c) kebutuhan anggaran pembelian amunisi, d) latihan rutin dalam kondisi damai (baik perorangan dan satuan), e) operasi militer selain perang, dan f) operasi perang. Peserta dari Kemhan RI dan TNI mampu menghitung keseluruhan biaya untuk suatu aset/program persenjataan sepanjang siklus masa pakai suatu aset, sistem atau program, termasuk a) biaya langsung dan tidak langsung terkait program, b) biaya apapun yang tidak akan terjadi jika sistem tidak ada (terlepas dari sumber pendanaan atau kontrol manajemen, dan c) kerangka waktu analisis biasanya mencakup

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kolonel Agus Teguh, 25 Oktober 2016

<sup>35</sup> Wawancara dengan akademisi pertahanan, Begi Hersutanto

---

<sup>36</sup> Renhan, 2015, *Opcit.*, hlm. 4

rentang masa operasional yang diharapkan dari sebuah sistem yang baru.

Pada tahun 2015, kegiatan masih dilakukan antara Ditjen Renhan dan U.S. DIRI dengan penambahan materi *Defense Strategic Plan Mapping (DSP Mapping)*. Melalui materi ini, Kemhan RI dan TNI mampu memetakan proses perencanaan dan penganggaran dalam renstra sebuah negara sesuai dengan praktik terbaik internasional. Dalam proses kegiatan, Ditjen Renhan mengundang beberapa grup kecil yang memiliki peran dalam Renstra Indonesia karena terdapat sesi diskusi yang menganalisa proses pemetaan Renstra Indonesia.<sup>37</sup> Walaupun pembahasan berkaitan dengan Renstra Indonesia, Kemhan RI hanya mempelajari metodenya saja untuk menganalisa strategi dan sumber daya nasional dengan menganalisa, a) diagram proses kegiatan utama; b) daftar kronologis terkait waktu penyusunan dokumen perencanaan di lingkungan Kemhan RI dan TNI; dan c) organisasi yang bertanggung jawab, sehingga dapat mengidentifikasi potensi peningkatan dalam proses penyusunan Renstra.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Loccit*

<sup>38</sup> Renhan, 2015, *Ibid.*, hlm. 3

Poin b di atas mengidentifikasi bahwa *DSP Mapping* tidak dapat diaplikasikan. Metode penyusunan Renstra dengan *DSP Mapping* harus berpedoman pada strategi pertahanan suatu negara. Namun, strategi pertahanan Indonesia yang tertera dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) belum dibuat ketika Renstra Pertahanan Indonesia 2015-2019 disusun.<sup>39</sup> Sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPPH), Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, penyusunan dokumen Renstra saat ini hanya berpedoman kepada RPJMN sehingga strategi pertahanan yang dirumuskan oleh Ditjen Strahan belum dapat dijadikan pedoman. Mengingat Renstra 2015-2019 yang disusun tanpa berpedoman pada strategi pertahanan milik Ditjen Strahan, maka jelas bahwa *DSP Mapping* tidak dapat diaplikasikan oleh Kemhan RI. Terjaminnya kerahasiaan Renstra 2015-2019 dipastikan oleh Purnomo Yusgiantoro karena daftar yang harus dipersiapkan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 5

dalam pembangunan tiga renstra (2010-2014, 2015-2019, 2020-2024) tertera di dalam MEF.<sup>40</sup> Sementara, MEF adalah salah satu informasi yang tidak dapat dibagikan pada pihak asing.

Berkaitan dengan dokumen strategis, contoh dokumen strategis versi umum yang dapat dibuka salah satunya adalah Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI).<sup>41</sup> Sesuai dengan Permenhan No. 28 Tahun 2015 Pasal 7, BPPI masuk dalam klasifikasi dokumen strategis yang menjadi bagian dari dokumen pembangunan pertahanan negara. Menurut Agus Teguh BPPI juga dijadikan pembahasan dalam *workshop* U.S. DIRI kepada Ditjen Strahan pada tahun 2015.<sup>42</sup> Para peserta mendapatkan ilmu mengenai metode atau caranya saja dalam menyusun Buku Putih Pertahanan suatu negara secara terintegrasi dan konsisten.<sup>43</sup> Berdasarkan *Strahan-DIRI Action Plan* (SDAP) 2015<sup>44</sup>, U.S. DIRI memberikan materi yang berkaitan dengan *Defense Strategy*. Dalam materi tersebut, terdapat pembahasan untuk melakukan

pemetaan terbaik dalam proses penyusunan strategi yang diberikan U.S. DIRI, dimana materi tersebut diberikan melalui contoh-contoh dari negara-negara lain.

Dalam *Poehan-DIRI Action Plan 2015* (PDAP-2015), pencantuman *major project* terkait *Life Cycle Cost* (LCC) menunjukkan keselarasan dengan tujuan yang diupayakan Kemhan RI dalam meningkatkan *capacity building* bagi seluruh bidang yang berkaitan dengan potensi pertahanan, misal industri pertahanan.<sup>45</sup> LCC memang tidak dapat digunakan untuk membuat keputusan. Namun, LCC dapat membantu kinerja *decision maker* dalam melakukan pertimbangan atas pembelian alutsista yang tertentu. Melalui LCC, *decision maker* dapat mengkalkulasikan biaya total alternatif, biasanya untuk membeli satu jenis atau sekelompok aset, memberikan informasi kepada pengambil keputusan (*decision maker*) mengenai biaya total alternatif atas penggunaan yang diharapkan (*expected life cycle*), dan membandingkan biaya total alternatif

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Menteri Pertahanan Periode 2009-2014, Prof. Purnomo Yusgiantoro, 26 Oktober 2016

<sup>41</sup> *Loccit*

<sup>42</sup> Wawancara dengan Agus Teguh, *Opcit*

<sup>43</sup> Wawancara dengan Romson Sianturi

<sup>44</sup> SDAP merupakan Dokumen Terbatas terkait *Action Plan* antara Ditjen Strahan dan U.S. DIRI

---

<sup>45</sup> Poethan, (2016), *Unpublished Document: Ditjen Poethan - U.S. DIRI Action Plan 2016*, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

selama periode waktu pada umumnya.<sup>46</sup> Purnomo Yusgiantoro memberikan pandangan bahwa diantara seluruh materi yang diberikan U.S. DIRI, LCC dinilai relevan untuk diaplikasikan. Dengan adanya LCC, sebuah organisasi dapat menghindari kesalahan besar ketika perencanaan pengadaan peralatan militer karena biasanya yang terjadi adalah terlalu fokus pada biaya pembelian.<sup>47</sup> Adapun konsep dasar LCC yang harus dikuasai terdiri dari a) *investment cost*; b) *operating cost*; dan *total (investment and operating) LCC*. Untuk mempermudah memahami konsep dasar di atas, U.S. DIRI memberikan contoh penghitungan dari Australia.

Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI dalam mengangkat topik LCC memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung diperlihatkan melalui peningkatan pemahaman SDM Kemhan RI dan TNI dalam menerima ilmu LCC. Dampak tidak langsung ditunjukkan dengan adanya efek yang diberikan dalam perencanaan pengadaan alutsista ketika SDM mulai mempraktikkan LCC. Kedua

dampak ini berperan pada kondisi sumber daya pertahanan Indonesia yang masih memiliki keterbatasan mengingat adanya ketidakseimbangan antara postur pertahanan dan anggaran pertahanan. Kedua aspek tersebut menjadi faktor pertimbangan penting karena anggaran pertahanan yang mumpuni sangat dibutuhkan Indonesia dalam memenuhi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan. Kondisi postur pertahanan Indonesia yang masih terbatas meliputi komponen kemampuan dan kekuatan. Komponen kemampuan Indonesia seperti kemampuan pertahanan, intelijen strategis, operasi militer selain perang (OMSP), dan kemampuan dukungan, belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya alutsista/materiil, sarana dan prasarana, SDM serta terbatasnya dukungan anggaran.<sup>48</sup> Begitu juga komponen kekuatan, ditinjau dari segi kuantitas alutsista secara umum masih harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi geografis di Indonesia.<sup>49</sup> Maka dari itu, Indonesia perlu untuk meningkatkan postur

---

<sup>46</sup> DIRI, U.S., (2013), *Workshop: Life Cycle Cost*, Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hlm. 5

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.

---

<sup>48</sup> Karim, S, (2014), *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, hlm 12

<sup>49</sup> *Loccit*

pertahanan.<sup>50</sup> Kondisi yang terbatas dari kualitas alutsista juga harus didukung oleh anggaran pertahanan yang mencukupi mengingat pembicaraan mengenai alutsista tidak sekedar masalah pembelian, melainkan juga masalah pemeliharaan. Kualitas pengadaan alutsista sendiri masih terdapat yang tidak layak operasional karena mayoritas telah mencapai usia 40 tahun, demikian jangkauan biaya pembelian alutsista harus diperhatikan karena penggunaan hingga masa depan yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Dengan adanya LCC, setidaknya Kemhan RI dan TNI dapat mengkalkulasikan kebutuhan anggaran pengadaan alutsista sepanjang *life cycle*-nya tanpa beresiko mengalami kesalahan ekspektasi.

Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI masih berlangsung hingga tahun 2016, meskipun pelibatan hanya Ditjen Strahan dan Ditjen Pothan. Dalam kurun waktu 2013-2016, U.S. DIRI bertanggung jawab sepenuhnya dalam memberikan materi kepada peserta dari Indonesia melalui seminar, *workshop*, dan *training*. Ketiga bentuk di atas mengidentifikasi adanya upaya *capacity building* yang menjadi

kepentingan pertahanan Kemhan RI dalam bekerja sama. *Capacity building* diwujudkan a) untuk meningkatkan kapasitas pertahanan melalui pemberian ilmu bagi SDM Kemhan RI dan TNI; b) materi kegiatan diharapkan menjadi referensi bagi Kemhan RI dan TNI dalam meningkatkan manajemen institusi pertahanan meskipun tidak semua materi dapat diaplikasikan. Dari kerjasama ini, *capacity building* yang biasanya lebih familiar dengan bahasan yang mengarah pada *military capability* justru memberikan pemahaman lebih luas bahwa: a) bentuk pembangunan pertahanan dapat diwujudkan tidak hanya berlaku pada militer, melainkan juga melibatkan unsur sipil. Unsur sipil meliputi Kemhan RI dan unsur militer yang menjadi sasaran meliputi Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Bahkan, pengelolaan SDM pertahanan bidang pendidikan juga dilaksanakan dengan menyatukan sipil dan militer (*melting pot*) dalam upaya pembangunan sarana pendidikan melalui Universitas Pertahanan.<sup>51</sup> Dengan adanya kerangka kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI, Unhan mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

---

<sup>50</sup> Ruhterford, (2011), *Opcit.*, hlm. 2

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Punomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan RI, 26 Oktober 2017

program *overseas study program*; b) setiap keterlibatan TNI dalam kerjasama tidak selalu dalam bentuk operasional (lapangan). Pada setiap pelaksanaan *workshop* dan *training*, Mabes TNI dan Angkatan selalu hadir untuk mendapatkan ilmu dan keahlian baru; c) *capacity building* dalam bentuk pelatihan dapat berdampak pada peluang kerjasama yang lebih luas.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas SDM Kemhan RI dan TNI, baik dari segi teori maupun praktis. Peningkatan ini juga memberikan implikasi pada peningkatan kualitas kelembagaan. Artinya, kepentingan *capacity building* SDM ini selaras dengan satu dari empat pokok substansi Renstra Pertahanan Indonesia. Diketahui Renstra Pertahanan Indonesia (2015-2019) memiliki rencana strategis yang fokus pada anggaran, SDM, alutsista, dan sarana dan prasarana. Mengingat penyelenggaraan pelatihan dalam kerjasama ini memberikan peningkatan terhadap SDM yang profesional dalam proses perencanaan anggaran (pembelian alutsista dan program), maka pertimbangan *capacity building*

sesuai dengan fokus rencana pada aspek SDM didalam Renstra.

Profesionalitas SDM Kemhan RI dan TNI merupakan modal bagi Indonesia, mengingat profesionalitas sumber daya merupakan bentuk upaya dalam diplomasi pertahanan yang modern.<sup>52</sup> Pertimbangan kondisi SDM ini merupakan wujud kepentingan Indonesia dalam mengelola sumber daya pertahanan negara. Efektifitas penyelenggaraan manajemen sumber daya pertahanan ditentukan oleh organisasi yang profesional. Maka dari itu, pelatihan pada kerjasama ini sejalan dengan pembinaan kemampuan untuk profesionalitas kementerian dan militer yang tercermin dalam Doktrin Pertahanan Negara.<sup>53</sup> Lebih jauh, profesionalitas SDM yang sedang dikembangkan dapat berimplikasi pada pengembangan pengelolaan anggaran pertahanan, postur pertahanan, infrastruktur militer, dan industri pertahanan.

#### **b. Trust Building**

Salah satu pertimbangan Kemhan RI bekerja sama dengan U.S. DIRI adalah kepentingan nasional yang mengacu

---

<sup>52</sup> Supriyatno, M., (2014), *Opcit.*, hlm. 181

<sup>53</sup> Kemhan, (2014), *Opcit*, hlm. 63

pada CBMs dan *capacity building*.<sup>54</sup> Untuk mendukung *capacity building*, Kemhan RI memanfaatkan peluang dalam mempelajari ilmu yang dimiliki U.S. DIRI berkaitan dengan *capacity building*. Kemhan RI memilih U.S. DIRI karena mengingat Amerika Serikat sebagai negara maju yang berpengalaman dalam manajemen pertahanan. Dengan adanya kerjasama yang mendukung *capacity building* Kemhan RI dan TNI, diharapkan Amerika Serikat dapat melihat adanya kemajuan dalam bidang pertahanan di Indonesia yang lebih baik sehingga *trust building* Amerika Serikat kepada Indonesia dapat terus meningkat.

Purnomo Yusgiantoro menegaskan pentingnya *trust building* untuk dicapai karena Kemhan RI dan TNI memerlukan mitra yang dapat mendukung kemampuan pertahanan Indonesia. Indonesia dapat mengambil manfaat dengan menjalin pertemanan dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat merupakan negara *superpower* di dunia. Dalam pandangan yang positif, *trust building* yang terbentuk diantara kedua negara dapat mengurangi faktor negatif yang dapat terjadi seperti sanksi

militer.<sup>55</sup> Hal ini ditunjukkan melalui inisiatif diadakannya kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI merupakan refleksi dari peningkatan kepercayaan pasca kerenggangan hubungan pada masa lalu. Diawali dengan mulainya *comprehensive partnership*, yang menjadi momentum dalam memperdalam diskusi pada IUSSD. Kerjasama yang lebih spesifik dapat diidentifikasi dari dua hal, yaitu a) pihak yang ditunjuk sebagai representasi, b) fokus kerjasama yang diberikan. Dalam kerjasama, Amerika Serikat memberikan kepercayaan kepada U.S. DIRI untuk memberikan asistensi keahlian kepada Kemhan RI. Kemhan RI yang dimaksud mencakup Ditjen Renhan, Ditjen Strahan, dan Ditjen Pothan. Setiap pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan institusi lain (Bappenas, Kemkeu, Unhan). Kontak bilateral yang dilakukan antara Kemhan RI dan U.S. DIRI secara jelas menunjukkan telah bentuk diplomasi pertahanan ditandai dengan adanya a) komponen TNI dan Non TNI, b) kontak

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ranon Sugiman, Kasubdit Bilateral Ditjen Strahan, 16 Oktober 2016

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Jan Pieter Ate, Direktur Kerjasama Internasional Periode 2009-2014, 24 November 2016

antar institusi pertahanan, c) pengembangan institusi pertahanan.

Idealnya, dalam setiap upaya diplomasi pertahanan memiliki kontribusi terhadap hubungan kedua negara. Begitu juga konsep diplomasi pertahanan mampu memperlihatkan CBMs sebagai salah satu karakteristik yang dapat diidentifikasi dari upaya diplomasi pertahanan. Sejalan dengan konsep di atas, kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI berkontribusi dalam membangun dan memelihara rasa saling percaya pada hubungan Indonesia dan Amerika Serikat (*confidence building*). Rasa saling percaya yang diupayakan keduanya didasarkan pada kilas balik ketika hubungan Indonesia dan Amerika Serikat mengalami penurunan pada masa pemberian sanksi militer kepada Indonesia. Namun, kondisi tersebut kembali pulih melalui pembukaan hubungan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Bahkan Purnomo Yusgiantoro menginginkan dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia dalam rangka *capacity building in defence resource management* pada tahun 2013.<sup>56</sup> Erik J. Leklem melanjutkan bahwa Kemhan RI

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Erik J. Leklem, Director of Defence Management in U.S. Embassy, 21 Januari 2017

dan U.S. DIRI telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dan *confidence building* dalam profesionalisasi pertahanan, pendidikan pertahanan dan militer, dan pertukaran praktik terbaik dalam manajemen pertahanan.

Secara detail, kontribusi *confidence building* dari kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI dapat dipahami melalui konsep CBMs yang dikemukakan oleh Aileen S.P. Baviera. Berdasarkan tipologinya, CBMs dapat diidentifikasi dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi, transparansi, konsultasi, itikad baik, dan pemaksaan.<sup>57</sup> Namun, terkait pembahasan dalam penelitian ini, hanya terdapat empat aktivitas yang relevan untuk dibahas lebih lanjut. *Pertama*, aktivitas komunikasi dalam rangka *confidence building* ditandai dengan adanya dialog rutin antara kedua pihak <sup>58</sup>Perlu dilihat terlebih dahulu kronologi dialog yang telah berlangsung sebelum dan setelah kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI

---

<sup>57</sup> Baviera, Alien S.P., (2001), *Opcit.*, hlm. 4

<sup>58</sup> Wang, D., & Jiang, X.,(2009), *Session III: Confidence Building Measures: European Experiences and Asia-Pacific Practises*, German Institute of International and security Affairs Stiftung Wissenschaft und Politik, International and security Affairs. Berlin: Affairs Stiftung Wissenschaft und Politik, Federal Ministry of Defence & CSIS, hlm. 3

berlangsung. Perlu diketahui bahwa IUSSD dan Comprehensive Partnership 2010 telah berjalan lebih dahulu hingga akhirnya menjadi payung kerjasama yang lebih spesifik berupa kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI. Keberadaan ketiga kerjasama ini menunjukkan bahwa dialog mengenai pertahanan telah berlangsung lama dan secara konsisten rutin dilakukan. Sejak tahun 2002 hingga 2016, proses komunikasi dalam bidang pertahanan yang masih berlangsung mengidentifikasi upaya pemeliharaan *confidence building* antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pada jangka waktu tahun 2010-2014, dialog pertahanan menunjukkan peningkatan. Pada kerangka kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI, telah berlangsung 5 dialog dengan topik *defense resource management*. Lalu, meningkat 24 dialog yang dilengkapi dengan training pada tahun 2014, dengan fokus materi masih pada topik FOCIS. Peningkatan signifikan ditunjukkan pada tahun 2015 dari segi perluasan pelibatan pihak Kemhan RI yang secara langsung menambah materi yang dibahas, dibagi dalam 26 dialog. Pada tahun 2016, *hotline* antara Direktur Kerjasama Internasional dan Atase Pertahanan Amerika Serikat diadakan dalam

membahas evaluasi terhadap tindak lanjut program U.S. DIRI mendatang.<sup>59</sup> Seluruh rangkaian teknis yang dijabarkan menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam kerangka kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI dilakukan melalui dialog rutin dan *hotline*. Bahkan, kepastian dalam memudahkan komunikasi ini diberikan U.S. DIRI dengan menyiapkan paparan *workshop* dan *training* dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris.<sup>60</sup> Seluruh rangkaian dialog yang telah berjalan mengidentifikasi bahwa kedua negara terus memberi dan memelihara kepercayaan satu sama lain, senada dengan konsep diplomasi pertahanan yang menjelaskan tujuan untuk saling membangun CBMs.

Kedua, aktivitas transparansi tidak dilakukan dengan adanya observasi khusus pihak Amerika Serikat kepada Indonesia semacam melakukan pengawasan pada operasi militer. Transparansi kerangka kerjasama ini hanya dilakukan dengan menunjukkan keterbukaan dalam informasi, baik dalam menerima maupun memberi informasi. Kemhan RI dan TNI secara terbuka menerima informasi dalam

---

<sup>59</sup> Strahan, (2016), *Opcit*

<sup>60</sup> Wawancara dengan Erik J. Leklem, *Opcit*

pengaplikasian ilmu baru yang dianggap dapat bermanfaat bagi peningkatan kapabilitas pertahanan di Indonesia. Kemhan RI terbuka dalam menerima masukan yang diberikan oleh U.S. DIRI mengenai FOCIS dan *DSP Mapping*, sekalipun Kemhan RI telah memiliki acuan yang lebih relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Keterbukaan dalam pemberian informasi yang dilakukan oleh Kemhan RI terhadap U.S. DIRI hanya dilakukan selama dokumen bersifat umum, seperti BPPI. Pembahasan mengenai penyusunan Buku Putih Pertahanan negara secara terintegrasi telah diberikan U.S. DIRI kepada Ditjen Strahan, yang kemudian dapat dijadikan referensi dalam BPPI. Mengingat kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI hanya sebatas pada penyelenggaraan *workshop* dan *training*, tidak terjadi pertukaran informasi dari masing-masing pihak. Jika transparansi yang dimaksud berupa pertukaran data atau informasi tertentu yang lebih spesifik, pihak U.S. DIRI dapat melakukan transparansi apabila para pemimpin diantara kedua negara mempromosikan transparansi.<sup>61</sup> Dalam kerjasama ini, U.S. DIRI berbagi

---

<sup>61</sup> *Loccit*

informasi mengenai metode perencanaan yang diterapkan di Amerika Serikat beserta contoh-contohnya. Erik J. Leklem meyakinkan bahwa melalui program DIRI para pimpinan dan personil dari kedua negara dapat saling mengetahui satu sama lain, mendiskusikan topik-topik secara bersama, membangun kepercayaan dalam hubungan, berbagi pengalaman dan pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah Amerika Serikat dan isu-isu didalamnya.<sup>62</sup>

*Ketiga*, aktivitas konsultasi yang berlangsung dalam kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI tidak ada khusus. Hal ini ditandai dengan adanya tidak adanya kantor konsultasi atau forum konsultasi khusus yang sengaja didirikan dalam penyelesaian permasalahan. Mengingat seluruh aktivitas CBMs dilakukan pada masa damai, fungsi konsultatif hanya dilakukan ketika *workshop* dan *training* sedang berlangsung. Ketika kegiatan berlangsung, konsultasi dapat yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibahas atau memanfaatkan kesempatan berikutnya untuk menanyakan topik materi yang lalu.<sup>63</sup> Konsultasi dilakukan

---

<sup>62</sup> *Loccit*

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ranon Sugiman, *Opcit*

dengan sekedar melakukan komunikasi langsung antara peserta dan pemberi materi. U.S. DIRI menyiapkan konsultan yang telah menjadi pakar dibidangnya.<sup>64</sup> Meskipun begitu, mekanisme konsultasi yang dilakukan menunjukkan tidak adanya senioritas diantara kedua pihak. Dengan begitu, kerjasama ini menjadi jembatan bagi pemikiran-pemikiran mengenai pembangunan rasa saling percaya diantara Indonesia dan Amerika.<sup>65</sup>

Keempat, pembicaraan mengenai asistensi keahlian kepada Kemhan RI dan TNI yang dilakukan Menteri Pertahanan RI dan Duta Besar Amerika Serikat, telah menunjukkan sebuah itikad baik pada keberlangsungan hubungan diantara keduanya. Bahkan pihak U.S. DIRI hanya sekedar merekomendasikan metode yang telah diberikan, tidak ada paksaan untuk mengaplikasikannya. Disamping itu, tidak ada keharusan bagi Kemhan RI dan TNI memberikan data-data internal ketika *training* sedang berlangsung. Itikad baik ditunjukkan U.S. DIRI dengan membiayai seluruh rangkaian kegiatan kerjasama ini. Penerimaan terhadap tawaran U.S.

DIRI yang dilakukan Kemhan RI dengan pemikiran yang positif, merupakan itikad baik dari pihak Kemhan RI.<sup>66</sup>

Berdasarkan seluruh kegiatan dalam kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI yang telah dijabarkan di atas, kedua pihak melakukan aktivitas komunikasi, transparansi, konsultasi, dan itikad baik. Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI berkontribusi terhadap pembangunan saling percaya yang diwujudkan bagi keduanya, dimana Indonesia meningkatkan kepercayaan kepada Amerika Serikat, begitu juga Amerika Serikat kepada Indonesia. Terutama mengingat sejarah panjang yang pernah terjadi diantara Indonesia dan Amerika Serikat. Bagi Indonesia, kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI menjadi bagian dari *confidence building* dalam mengembalikan keyakinan Amerika Serikat terhadap Indonesia didasarkan pada kondisi tegang yang pernah terjadi ketika Indonesia harus mendapatkan embargo militer. Begitupula, Amerika Serikat berupaya memberikan kepercayaan kepada Indonesia mengingat beberapa kasus pihak Indonesia masih bisa dikatakan belum mempercayai Amerika Serikat sebagai akibat dari kejadian yang berlangsung

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan BP, 13 Oktober 2016

<sup>65</sup> Wawancara dengan Purnomo Yusgiantoro, *Opcit*

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan BP, *Opcit*

pada masa lampau. Secara otomatis, hal ini akan berdampak pada anggapan yang buruk karena melihat seluruh upaya dalam kerjasama dengan pandangan yang negatif. Ia menyangkan kondisi tersebut harus terjadi, namun tetap berharap pada kerjasama ini akan membuka pandangan sebagian besar pihak Indonesia dan Amerika Serikat untuk meningkatkan kepercayaan satu sama lain.

Secara tidak langsung, Amerika Serikat dapat memperhatikan perkembangan pertahanan Indonesia, baik dari segi demokratisasi, hubungan sipil-militer, maupun HAM. Dalam hal demokratisasi dan hubungan sipil-militer, kemajuan pertahanan ditunjukkan melalui pembangunan institusi pertahanan (Kemhan RI dan TNI) yang berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Meskipun belum sepenuhnya diaplikasikan, adanya SSR menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menerapkan prinsip demokrasi dalam mendorong perbaikan insititusi pertahanan. Misalnya, dilakukan penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI yang pada awalnya memiliki dua peran besar sekaligus yakni politik dan pertahanan. Saat ini, TNI mempunyai paradigma baru yang

*applicable* dengan demokrasi diantaranya.<sup>67</sup> Sesuai dengan prinsip demokrasi, hubungan sipil-militer juga menunjukkan adanya kemajuan sejak muncul Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam OMSP, beberapa kasus bencana dan kemanusiaan menunjukkan adanya koordinasi antara peran sipil dan militer. Berkaitan dengan kemanusiaan, upaya perlindungan terhadap HAM ditunjukkan dalam UU Pertahanan Negara Pasal 3 tentang pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip, dua diantaranya merupakan demokrasi dan HAM. Kemajuan tiga hal di atas menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat citra sehingga *confidence building* dapat terbentuk melalui kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI. Hal ini penting mengingat kalau saja tidak ada interaksi seperti pada kerjasama ini, Amerika Serikat hanya mendengar dari sumber yang tidak inkredibel. Begitupun Amerika Serikat mengakui bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokrasi yang menghargai HAM dan bercita-cita untuk memiliki hubungan sipil-militer yang modern, seperti yang

---

<sup>67</sup> Sukma, R., & Prasetyono, E., (2003, 2), *Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police*, Working Paper Series: hal. 1-35, hlm. 17

tercantum dalam konstitusi dan undang-undang.<sup>68</sup>

Kedua, U.S. DIRI menunjukkan keinginannya untuk tetap melanjutkan kegiatan dalam kerangka kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI, meskipun kerjasama sedang dalam proses peninjauan ulang akibat polemik kehadiran U.S. DIRI yang dibahas dalam agenda evaluasi pada tahun 2016. U.S. DIRI. Walaupun begitu, U.S. DIRI menunjukkan keinginan bekerja sama dengan membuat pengajuan tertulis berupa tanggapan dari alternatif program yang ditawarkan Kemhan RI. Bahkan pada tanggal 1 Juni 2016 diselenggarakan pertemuan antara Dirkersin, staf Ditjakstra Ditjen Strahan, Athan AS, staf U.S. ODC, dan Tim U.S. DIRI yang membahas rencana usulan program DIRI selanjutnya.<sup>69</sup> Rangkaian kegiatan di atas memperlihatkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat masih berupaya memelihara kepercayaan satu sama lain untuk saling membicarakan permasalahan secara terbuka dan menemukan solusi terbaik bagi hubungan kedua negara.

Ketiga, kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI menjembatani pemikiran-

pemikiran yang lebih luas diantara kedua pihak. Artinya, *confidence building* yang telah terbangun memiliki implikasi pada keinginan untuk membentuk kerjasama lanjutan. Kerjasama lanjutan dalam bidang militer ini senada dengan yang dikatakan Erik J. Leklem bahwa Amerika Serikat membuka peluang untuk kerjasama pertahanan dan militer profesional yang baik, stabil, dan saling menghormati dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan efektifitas militer kedua negara dimasa depan. Amerika Serikat telah membangun kepercayaan atas Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang militer karena Indonesia pernah dianggap tidak transparan pasca Dwikora dan Trikora. Pasca Dwikora dan Trikora, FPDA dibentuk karena Indonesia dianggap tidak *trustable* di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara yang menjadi persemakmuran Inggris karena sikapnya yang ekspansif. Selain itu, negara anggota FPDA mulai menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia merupakan negara yang defensif, bukan ofensif. Keyakinan ini diperlihatkan dalam latihan bersama, dimana Malaysia mengirim M-29, Singapura mengirim F-16, Australia

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Erik J. Leklem, *Opcit*

<sup>69</sup> Strahan, (2016), *Opcit*

mengirim Hornet, Inggris mengirim Tornado dan Indonesia mengirim Sukhoi. Melalui latihan militer yang diselenggarakan, negara-negara FPDA menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang mencintai perdamaian, namun tidak akan menyerang kecuali mereka menyerang kedaulatan Indonesia (defensif).

Peningkatan kepercayaan hubungan terjalin melalui aktivitas CBMs secara profesional. Secara substansial, kegiatan yang melibatkan *people-to-people contact* ini yang juga sejalan dengan tujuan dari *Comprehensive Partnership 2010* pada JCM ke-3. Dengan adanya *people-to-people contact*, terbangun upaya saling kesepahaman mengenai kondisi kedua negara, baik antarpejabat maupun antarstaf yang terlibat dalam kegiatan. Meskipun begitu, tetap ada tantangan yang dihadapi Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI, misalnya kecurigaan dari individu Kemhan RI dan TNI sendiri terhadap kehadiran Amerika Serikat dalam kerjasama yang berlangsung. Selain itu, masih terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum maksimal. Pihak U.S. DIRI mengamati bahwa pihak Kemhan RI dan TNI sulit untuk

menyediakan waktu dalam bekerja sama dan berkoordinasi kepada pihak asing. Sementara, pihak Kemhan RI menganggap bahwa kendala ini disebabkan oleh peserta workshop tidak dapat hadir secara rutin karena tugas dari satuan kerjanya masing-masing dan sebagian pindah satuan (*tour of duty*) sehingga penyerapan materi tidak maksimal.<sup>70</sup> Adanya perbedaan bahasa, budaya, dan jarak geografi dapat menjadi kurangnya keakraban. Sementara, ketika Indonesia dan Amerika Serikat sedang bekerja sama dan bertukar informasi, maka sikap saling menghormati dan terbuka untuk menerima budaya masing-masing, sejarah, dan pengalaman militer, dapat menjadi manfaat yang besar untuk menanamkan saling pengertian.

Upaya pemeliharaan hubungan politis diantara keduanya dapat berlangsung karena adanya *sharing interest*. Amerika Serikat menyadari bahwa penerapan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan, maka jelas penerapan demokrasi dan HAM di Indonesia sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dalam mengupayakan promosi nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan pluralisme

---

<sup>70</sup> Renhan, (2014), *Opcit*

dimanapun. Sejalan dengan kepentingan nasional kategori '*important*'<sup>71</sup>, Amerika Serikat menunjukkan kepentingannya dalam mempromosikan pluralisme. Hal ini dilakukan mengingat jumlah populasi, muslim, dan kelompok etnis dari Indonesia merupakan model yang bagus untuk mempromosikan pluralisme.<sup>72</sup> Lebih jauh, ketiga kondisi yang dimiliki Indonesia dapat mendukung Amerika Serikat untuk mengupayakan kepentingan kontra-terorisme sesuai dengan level kepentingan *important*. Dari segi ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai pemimpin yang kuat, kapabel, dan disegani di ASEAN menjadi modal untuk memastikan stabilitas di kawasan Asia Pasifik mengingat Tiongkok merupakan tantangan bagi Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan pada level *vital* dan *extremely important* Amerika Serikat.<sup>73</sup> Hal ini juga sejalan dengan latar belakang kondisi lingkungan strategis Indonesia yang berkaitan dengan *U.S. rebalancing strategy* dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Tidak hanya itu, Amerika

Serikat melihat peluang dalam kerjasama maritim dimasa mendatang mengingat hal ini selaras dengan kebijakan Visi Maritim Global milik Indonesia.<sup>74</sup> Kondisi ini dapat mendukung kedua negara dalam memainkan peran dalam menangani ancaman *non state actor*.

### **Kesimpulan**

Dengan menggunakan Model Pilihan Rasional, faktor pertimbangan Indonesia dalam kerjasama adalah kepentingan *capacity building* SDM pertahanan Indonesia dan *trust building* kepada U.S. DIRI. *Capacity building* ditunjukkan dengan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas SDM pertahanan Indonesia melalui penyelenggaraan seminar, *workshop*, dan *training*. Dukungan terhadap kualitas SDM ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan manajemen pertahanan yang lebih efektif dan efisien, mengingat anggaran pertahanan Indonesia yang sangat terbatas namun kebutuhan pertahanan yang semakin meningkat diakibatkan spektrum ancaman yang semakin luas. Sementara, *trust building* dimaksudkan Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan Amerika Serikat dalam

---

<sup>71</sup> Allison, G. T., & Blackwill, R., (2000), *America's National Interests*, United States: The Commission on America's National Interests, hlm. 7

<sup>72</sup> Denmark, A. M., Sukma, R., & Parthemore, C., (2010, 6), *Opcit*, hlm. 6-8

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 7

bidang pertahanan sehingga kerjasama dapat terjalin semakin intensif dan spesifik sebagai mitra yang solid. Lebih dalam, Indonesia memperbaiki kepercayaan Amerika Serikat melalui U.S. DIRI mengingat kilas balik Indonesia yang pernah memiliki preseden penetapan sanksi militer.

Dalam perspektif diplomasi pertahanan, Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI berkontribusi terhadap confidence building Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui mekanisme CBMs berupa komunikasi, transparansi, konsultasi, dan itikad baik, kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI berperan sebagai salah satu instrumen untuk mengembalikan kepercayaan internasional melalui kerjasama pertahanan. Confidence building kedua pihak mengalami peningkatan mengingat dinamika hubungan kedua negara pernah terjadi di masa lalu. Perubahan sikap dan pandangan Amerika Serikat yang saat ini positif inilah yang secara lebih luas dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan membuka peluang Indonesia untuk meningkatkan peran globalnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Allison, G. T., & Blackwill, R. (2000). *America's National Interests. United States: The Commission on America's National Interests.*
- Bakrie, C. R. (2014). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory.* New York: Palgrave Macmillan.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global Dalam Teori dan Prakte.* Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.
- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia.* Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kemlu. (2011). *Diplomasi Indonesia 2010.* Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Nuchterlein, D. E. (1997). *United States National Interest in a Chinging World.* Lexington KY: The University Press of Kentucky.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relations: A Framework for Understanding,* 2nd Edition. New York: MacMillan Publishing Company.
- Roy, S. (1995). *Diplomasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan.* Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia
- ### Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah
- Allison, G. T. (1969, September). *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis.* *The American Political Science Review*, 63(3), 689-718.
- Baviera, A. S. (2001). *Bilateral Confidence Building with China in*

Relation to the South China Seas Dispute: A Phillipine Perspective. Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada.

- Denmark, A. M., Sukma, R., & Parthemore, C. (2010, 6). *Crafting a Strategic Vision: A New Era of U.S.-Indonesia Relations*. Washington, DC: Center for New American Security (CNAS).
- Pedrason, R. (2015). *ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?* Heidelberg, Germany: Universitat Heidelberg.
- Rutherford, T. (2011). *Military Balance in Southeast Asia*. Research Paper 11/79, 50-62.
- Sullivan, A. (2014). *Strengthening U.S.-Indonesia Defense Ties*. Washington, DC: Center for New American Security.
- Sukma, R., & Prasetyono, E. (2003, February). *Security Sector Reform in Indonesia: The Military and the Police*. Working Paper Series, hal. 1-35.
- Wang, D., & Jiang, X. (2009). *Session III: Confidence Building Measures: European Experiences and Asia-Pacific Practises*. German Institute of International and security Affairs Stiftung Wissenschaft und Politik, International and security Affairs. Berlin: Affairs Stiftung Wissenschaft und Politik, Federal Ministry of Defence & CSIS.

#### **Dokumen**

- DIRI, U. (2013). *Workshop: Life Cycle Cost*. Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Pothan. (2016). Unpublished Document: *Ditjen Pothan - U.S. DIRI Action Plan 2016*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Renhan. (2013). Unpublished Document: *Laporan Terbatas Sambutan Dirjen Renhan Kemhan Pada Seminar The Resource Management for Defense Strategic Plan*. Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Renhan. (2014). Unpublished Document: *Laporan Terbatas Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan*. Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Strahan. (2016). Unpublished Document: *Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI*. Jakarta Pusat: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Strahan. (2016). Unpublished Document: *Ditjen Strahan - U.S. DIRI Action Plan 2016*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Strahan. (2016). Unpublished Document: *Kerjasama Pembentukan Kerjasama Kemhan RI dan U.S. DIRI*. Jakarta: Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

#### **Sumber Online**

- Afrida, N. (2015, 1 8). *US to get involved in RI military*. Dipetik 6 15, 2016, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/08/us-get-involved-ri-military.html>
- Antara. (2012, September 21). *US, Indonesia hold third joint commission meeting in Washington*. Dipetik December 02, 2016, dari Antara News: <http://www.antaraneews.com/en/news/84645/us-indonesia-hold-third-joint-commission-meeting-in-washington>
- DMC. (2015, 1 7). *Action Plan 2015 Pedoman Kerjasama Peningkatan Sistem dan Manajemen*

Pertahanan. Dipetik 5 5, 2016, dari Defence Media Center Kementerian Pertahanan: <http://dmc.kemhan.go.id/post-action-plan-2015-pedoman-kerjasama-peningkatan-sistem-dan-manajemen-pertahanan.html>

DoS. (2011, 7 24). United States-Indonesia Comprehensive Partnership. Dipetik 5 5, 2016, dari U.S. Department of State: [www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/169001.htm](http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/07/169001.htm)

Kemkeu. (2011). Aplikasi RKA-KL. Dipetik Februari 11, 2017, dari Departemen

Kuangan: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-produk-aplikasi-list.asp?sub=1>

Putra, D. (2015, Januari 9). Pihak Asing Dilarang Ikut Susun Renstra Pertahanan. Dipetik Agustus 10, 2016, dari Sinar Harapan: <http://sinarharapan.co/news/read/150109052/pihak-asing-dilarang-ikut-susun-renstra-pertahanan>.